



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN KINERJA 2019

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



[DITJENGAKKUM.KLHK](https://www.facebook.com/ditjengakkum.klhk)



[GAKKUMKLHK](https://twitter.com/GAKKUMKLHK)



[GAKKUM_KLHK](https://www.instagram.com/GAKKUM_KLHK)



[GAKKUM_KLHK](https://www.youtube.com/GAKKUM_KLHK)



[GAKKUM.MENLHK.GO.ID](https://gakkum.menlhk.go.id)



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan salah satu dari lima komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang berlaku dan diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah secara nasional baik untuk Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga) maupun Daerah. Sebagai wujud pelaporan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK menyusun Laporan Kinerja (LKj) tahun 2019.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan oleh Setditjen PHLHK dalam pelaksanaan kinerja selama kurun waktu satu tahun. dan implementasi transparansi akuntabilitas dan refleksi kinerja. Laporan Kinerja Setditjen PHLHK memuat berbagai upaya dan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efisien.

Dengan Laporan Kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran kesekretariatan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Setditjen PHLHK pada tahun selanjutnya.

Jakarta, Februari 2020
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si

NIP. 19630705 198303 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (disingkat dengan Setditjen PHLHK) merupakan unit kerja/perangkat organisasi di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengemban tugas dan fungsi dalam koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada Tahun 2019 Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK sebagaimana tertuang dalam Restra 2015 -2019 Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 1 (satu) kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum yang menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu "Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHLHK "SAKIP" dengan nilai minimal 78.00 (A) di Tahun 2019. Adapun target IKK pada tahun 2018 sebesar 76 poin. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Satker Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK kepada publik, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Dari hasil penilaian SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK diperoleh sebesar 76,64 point. Hasil pengukuran dari indikator kinerja kegiatan menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK pada tahun 2019 sebesar 101% dengan capaian pelaksanaan anggaran sebesar 50.153.608.367,- atau sebesar 99,16% dari pagu sebesar 50.579.285.000,-. Adapun Rasio efektivitas capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2019 > 1.00 yang berarti bahwa efektifitas capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK meningkat dibanding capaian tahun 2018.

Meskipun demikian, Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK berkomitmen menyempurnakan dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	7
D. SUMBER DAYA MANUSIA	8
E. ANGGARAN	9
F. SARANA DAN PRASARANA	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019	11
B. RENCANA KERJA SETDITJEN PHLHK 2019	17
C. PERJANJIAN KINERJA 2019	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. PENGUKURAN KINERJA	20
B. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS	22
C. EVALUASI KINERJA	23
D. ANALISIS CAPAIAN SASARAN KEGIATAN	23
1. Bagian Program Dan Evaluasi	24
2. Bagian Keuangan Dan Umum	32
3. Bagian Hukum Dan Kerjasama Teknik	40
4. Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	52
E. PENGUKURAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS	56
BAB IV PENUTUP	58
A. Simpulan Kinerja Tahun 2019	58
B. Rencana Perbaikan Tahun 2020	59
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi sumber daya manusia Setditjen PHLHK berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan	8
Tabel 2 Sebaran Pegawai Setditjen PHLHK berdasarkan Usia	8
Tabel 3 Komposisi Pegawai Setditjen PHLHK berdasarkan Jabatan.....	8
Tabel 4. Komposisi sumber daya manusia berdasarkan Jabatan Fungsional.....	9
Tabel 5 Anggaran Setditjen PHLHK tahun 2019	9
Tabel 6 Sarana dan Prasarana Setditjen PHLHK Tahun 2019	10
Tabel 7 Kegiatan unit kegiatan serta sasaran unit kegiatannya	12
Tabel 8 Target Indikator Unit Kegiatan Setditjen PHLHK tahun 2015 – 2019	15
Tabel 9 Rencana Kinerja Setditjen PHLHK Tahun 2019	17
Tabel 10 Perjanjian Kinerja Setditjen PHLHK	19
Tabel 11 Pengukuran capaian kinerja Setditjen PHLHK tahun 2019	21
Tabel 12 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Ditjen PHLHK.....	24
Tabel 13 Pengukuran unit kegiatan Bagian Program dan Evaluasi	25
Tabel 14 Nilai SAKIP Ditjen PHLHK tahun 2015 dan 2019	27
Tabel 15 Capaian Nilai SAKIP Ditjen PHLHK Tahun 2015-2018	28
Tabel 16 Hasil Validasi Penilaian Maturitas SPIP per Eselon I	29
Tabel 17 Pengukuran unit kegiatan keuangan dan umum	33
Tabel 18 Realisasi SetDitjen PHLHKdari 2015 - 2019	33
Tabel 19 Realisasi SetDitjen PHLHK2019	34
Tabel 20 Pengelolaan surat/arsip.....	37
Tabel 21 Sarana dan Prasarana Setditjen PHLHK Tahun 2019	38
Tabel 22 Capaian Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik	40
Tabel 23 Nota Kesepahaman Kerja Sama Dalam Negeri TA. 2019.....	44
Tabel 24 Perjanjian Kerja Sama Ditjen Gakkum	47
Tabel 25 Rencana Kerja Sama	47
Tabel 26 Kegiatan yang dihadiri oleh Ditjen PHLHK	48
Tabel 27 Mitra Kerja Sama/Hibah Luar Negeri Ditjen PHLHK.....	50
Tabel 28 Pengukuran unit kegiatan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana ...	52
Tabel 29 Pengukuran efektivitas dan efisiensi sasaran strategis Setditjen PHLHK .	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Setditjen PHLHK tahun 2019	7
Gambar 2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Setditjen PHLHK	12
Gambar 3 Sasaran Unit Kegiatan Program dan Evaluasi	13
Gambar 4 Sasaran Unit Kegiatan Keuangan dan Umum.....	13
Gambar 5 Sasaran Unit Kegiatan Kepegawaian dan Ortala	14
Gambar 6 Sasaran Unit Kegiatan Hukum dan Kerja Sama Teknik	14
Gambar 7 Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan.....	41
Gambar 8 Kegiatan Rumusan Kajian Hukum.....	42
Gambar 9 Kegiatan Anggota Tim Pembelaan Hukum.....	43
Gambar 10 Nota Kesepahaman KLHK dengan PPATK.....	46
Gambar 11 Perjanjian Kerja Sama Ditjen PHLHK dengan Ditjen Dukcapil	47
Gambar 12 Kegiatan Ditjen PHLHKpada Forum Internasional	50

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mengamanatkan agar Instansi Pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Melalui penerapan SAKIP, sistem manajemen yang berorientasi pada hasil ini, diharapkan dapat mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, dan responsif.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan dan melaporkan kinerja selama tahun 2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Setditjen PHLHK) sebagai unit eselon II telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Reviu* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap pemberi mandat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama tahun 2018. Laporan ini juga merupakan umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Setditjen PHLHK di tahun mendatang.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen PHLHK adalah unsur pembantu Direktur Jenderal PHLHK. Setditjen PHLHK dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PHLHK.

Setditjen PHLHK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PHLHK. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Setditjen PHLHK menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerjasama teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan
- e. bantuan hukum di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja, pembinaan sumber daya penegak hukum, pelayanan profesi sumber daya penegak hukum, serta sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal membawahi 4 bagian yang terdiri atas:

(1) Bagian Program dan Evaluasi

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, data, evaluasi, dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan.

Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b) penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program; dan
- c) penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan;

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a) Subbagian Program dan Anggaran, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
- b) Subbagian Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

(2) Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, pelaksanaan pembinaan sumber daya penegak hukum, dan pelayanan profesi sumber daya penegak hukum, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b) pelaksanaan pembinaan sumber daya penegak hukum, dan pelayanan profesi sumber daya penegak hukum;
- c) pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- d) penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan;

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a) Subbagian Kepegawaian, yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana formasi pegawai, administrasi kepegawaian dan pendisiplinan dan penghargaan pegawai, dan melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional.
- b) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

(3) Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, dan pengelolaan urusan keuangan, serta penyiapan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara;

- b) penyiapan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c) pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- d) pelaksanaan urusan perlengkapan;

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a) Subbagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan pembinaan tata persuratan serta urusan rumah tangga.
- b) Subbagian Perlengkapan, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan barang milik negara.
- c) Subbagian Administrasi Keuangan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan melakukan akuntansi keuangan barang milik Negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

(4) Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, fasilitasi kerja sama dan jejaring kerja, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknis dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:

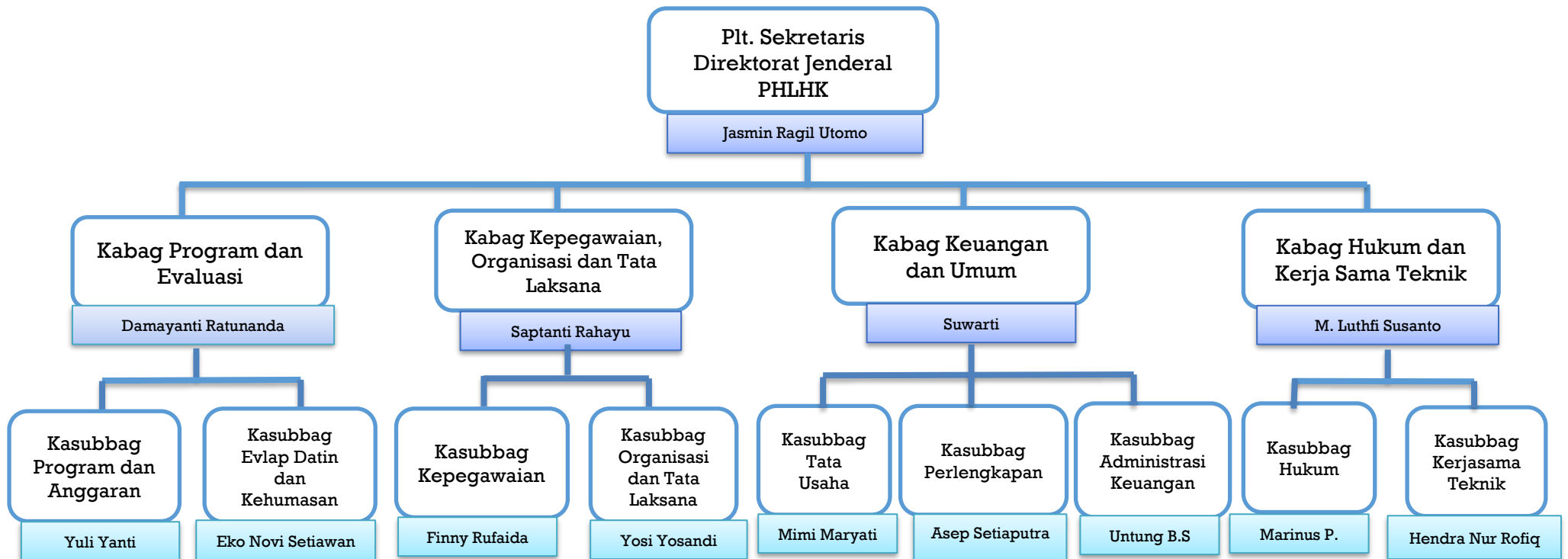
- a) penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- b) fasilitasi kerja sama dan jejaring kerja;
- c) penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- d) penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas:

- a) Subbagian Hukum, yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, serta melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, dan penanganan permasalahan, pertimbangan dan advokasi permasalahan hukum.
- b) Subbagian Kerja Sama Teknik, yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri, serta fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pada tahun 2019 struktur organisasi Setditjen PHLHK seperti pada gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi Setditjen PHLHK tahun 2019

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Setditjen PHLHK per Desember 2019 berjumlah 71 orang yang terdiri dari 46 orang PNS dan 25 orang Non PNS, dengan komposisi seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1 Komposisi sumber daya manusia Setditjen PHLHK berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

No	Sumber Daya Manusia	Jenis Kelamin		Total					
		L	P	SMU	D3	S1	S2	S3	JUMLAH
1	ASN PNS	29	17	12	7	14	11	2	46
2	PPNPN	19	6	11	1	13	0	0	25

Tabel 2 Sebaran Pegawai Setditjen PHLHK berdasarkan Usia

No	Unit Kerja	Usia (tahun)				Total
		21 - 30	31 - 40	41 - 50	< 50	
1	ASN PNS	2	14	12	18	46
2	PPNPN	14	6	1	4	25
TOTAL PEGAWAI						71

Tabel 3 Komposisi Pegawai Setditjen PHLHK berdasarkan Jabatan

Status	Total	
STRUKTURAL	15	
PELAKSANA	26	
FUNGSIONAL LAIN		
	Terampil	0
	Ahli	5
TOTAL PEGAWAI		46

Tabel 4. Komposisi sumber daya manusia berdasarkan Jabatan Fungsional

Status Fungsional	Jenjang	Total
Fungsional Perencana	Ahli	3
Fungsional Analisis Kebijakan	Ahli	2
TOTAL FUNGSIONAL		5

Pada tahun 2019 terdapat 2 orang Pegawai Sekretariat Ditjen PHLHK yang pensiun, 1 orang alih tugas ke Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.

E. ANGGARAN

Pelaksanaan program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK pada tahun 2019 didukung oleh anggaran sebesar Rp. 50.579.285.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 Anggaran Setditjen PHLHK tahun 2019

No	Anggaran	2019
1	Bagian Program dan Evaluasi	5.769.230.000,-
2	Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana	4.285.570.000,-
3	Bagian Keuangan dan Umum	4.990.800.000,-
4	Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik	3.154.532.826,-
5	Gaji dan Operasional Kantor	28.727.413.965,-
6	Pengadaan Barang dan Jasa (layanan Internal)	3.470.272.743,-
	Total	50.579.285.000,-

F. SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Setditjen PHLHK dilengkapi dengan sarana dan prasarana perkantoran dengan jenis, kondisi dan jumlah per 31 Desember 2019 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 6 Sarana dan Prasarana Setditjen PHLHK Tahun 2019

No.	Jenis	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	Kendaraan roda 4	11	9	2	22
2	Kendaraan roda 2	10	3	3	16
3	Laptop	59	0	24	83
4	Printer	46	12	16	74
5	Scanner	17	0	0	17
6	Kamera digital	19	0	4	23
7	Handycam	0	0	10	10
8	Tablet PC	6	0	0	6
9	Eksternal Hardisk	39	0	17	56
10	Senjata Api	22	0	0	22
11	Drone/kamera udara	4	0	8	12
12	GPS	8	0	11	19

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK (disingkat dengan Setditjen PHLHK) mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2015 - 2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan kendala yang mungkin timbul. Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK merupakan penanggung-jawab “Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen PHLHK”, yang sasaran kegiatannya merupakan *cross cutting issues* dan diharapkan akan mendukung semua kegiatan tersebut di atas.

Setditjen PHLHK membawahi empat unit kerja eselon tiga yang disebut Bagian, yaitu, Bagian Program dan Evaluasi, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Keuangan dan Umum, serta Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Setiap Bagian merupakan penanggung-jawab “Unit Kegiatan”, yang merupakan sub kegiatan dari “Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen PHLHK”, sebagaimana ditunjukkan dengan diagram pada Gambar Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Sekretariat Jenderal PHLHK. Indikator Kinerja Kegiatan termaksud di atas mencerminkan tugas, fungsi, dan kewenangan bagian-bagian di bawah Setditjen ini. Setiap Bagian tersebut bertanggung-jawab pada “Sasaran Unit Kegiatan” yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta memastikan capaiannya akan menuju pada Sasaran Kegiatan. Gambar 2 berikut menggambarkan sasaran kegiatan dan indikator kegiatan pada Setditjen PHLHK.



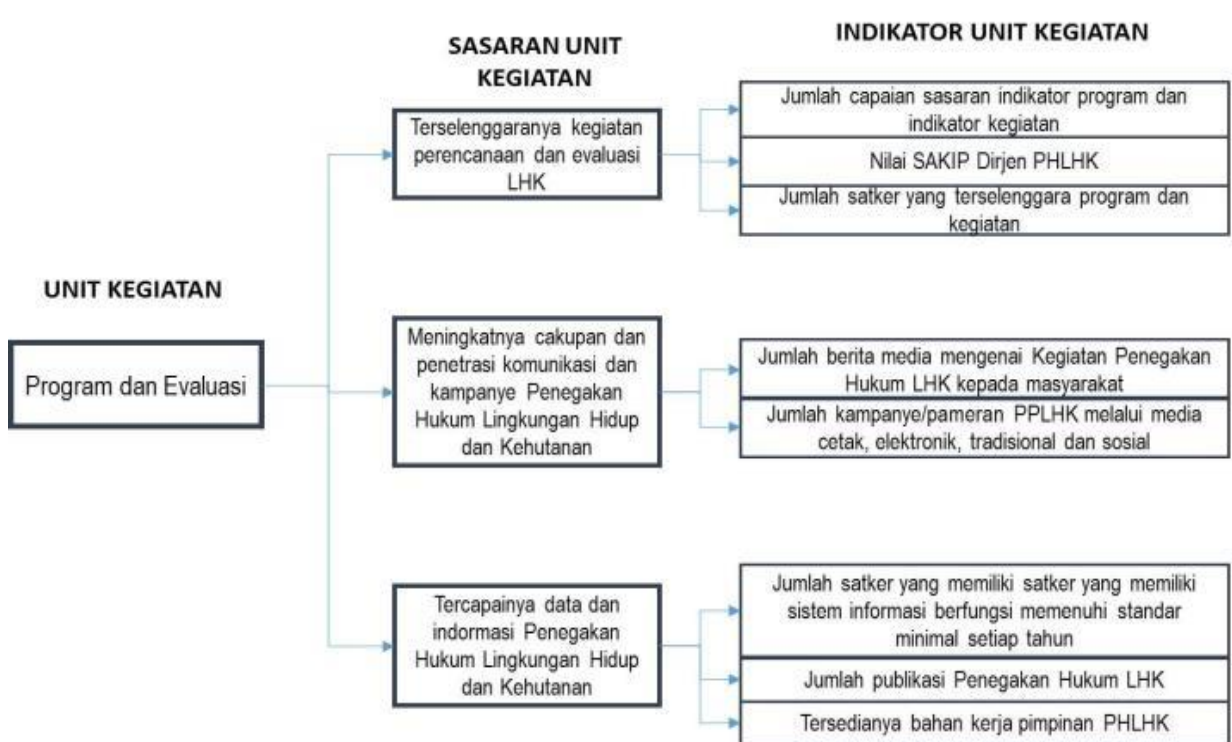
Gambar 2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Setditjen PHLHK

Tabel 7 berikut menggambarkan kegiatan dan sasaran unit kegiatan pada Setditjen PHLHK.

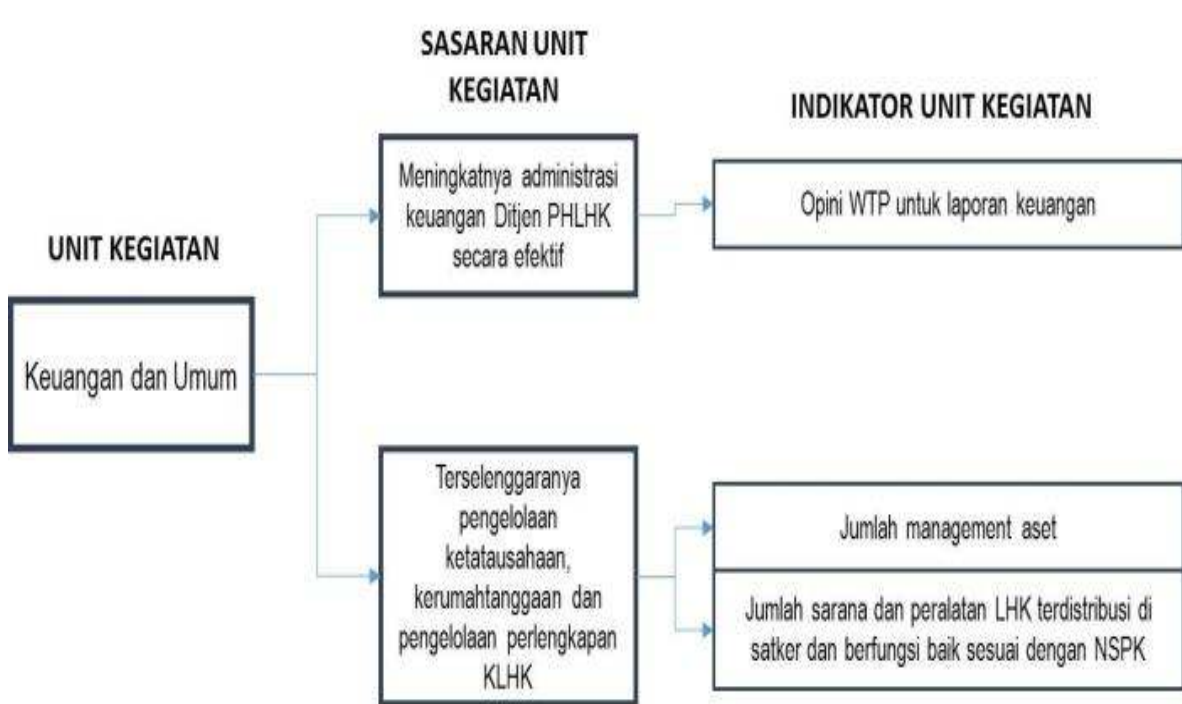
Tabel 7 Kegiatan unit kegiatan serta sasaran unit kegiatannya

KEGIATAN KS:		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen PHLHK	
UNIT KEGIATAN		SASARAN UNIT KEGIATAN	
UK1	Program dan evaluasi	S1.P7.K5.UK1.1	Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK
		S1.P7.K5.UK1.2	Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		S1.P7.K5.UK1.3	Tercapainya data dan informasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
UK2	Kepegawaian, organisasi dan tata laksana	S1.P7.K5.UK2.1	Meningkatnya daya saing SDM Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		S1.P7.K5.UK2.2	Tersusunnya struktur organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif, dan efisien
UK3	Keuangan dan umum	S1.P7.K5.UK3.1	Meningkatnya administrasi keuangan Ditjen PHLHK secara efektif
		S1.P7.K5.UK3.2	Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK
UK4	Hukum dan Kerja sama Teknik	S1.P7.K5.UK4.1	Tersedianya rancangan aturan dan NSPK terkait Ditjen PHLHK
		S1.P7.K5.UK4.2	Tersedianya bantuan hukum Ditjen PHLHK
		S1.P7.K5.UK4.3	Terselenggaranya kerjasama teknis dalam meningkatkan efektivitas kegiatan PHLHK

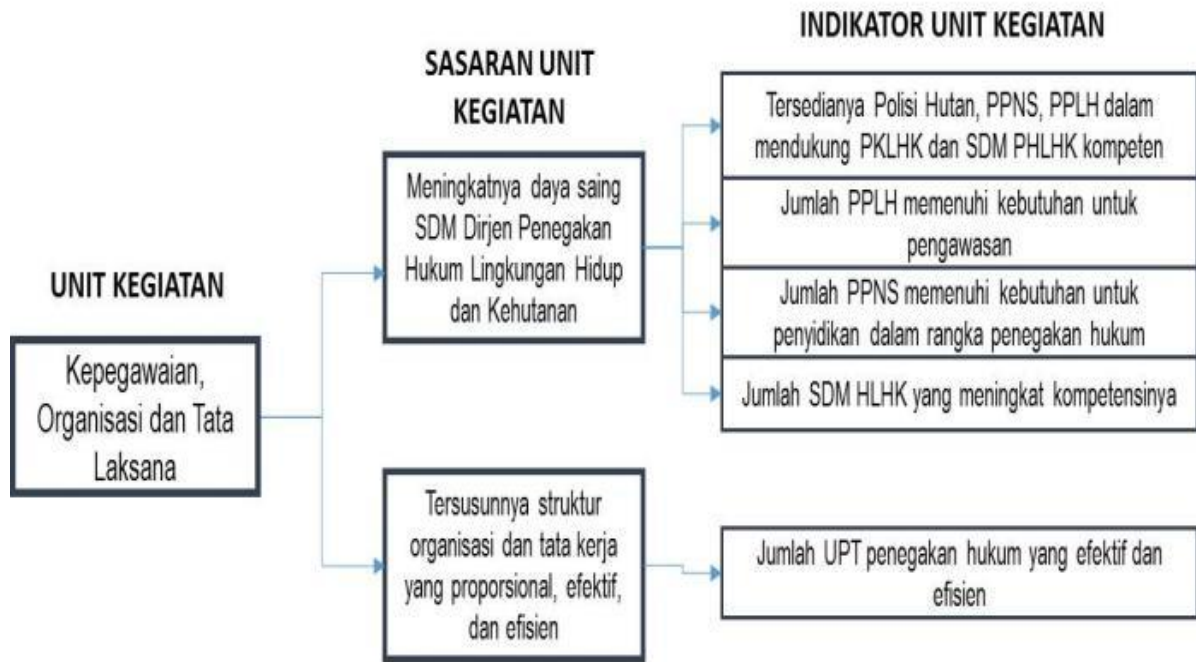
Sasaran masing-masing unit kegiatan Setditjen PHLHK tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:



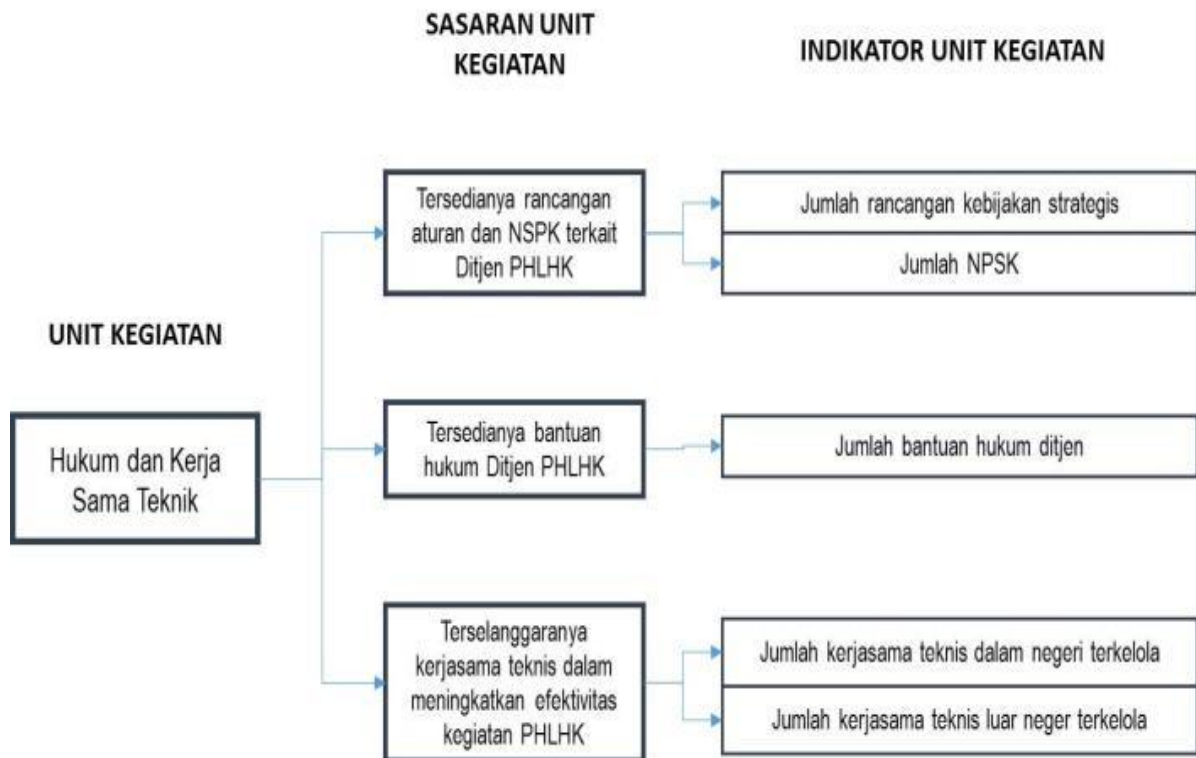
Gambar 3 Sasaran Unit Kegiatan Program dan Evaluasi



Gambar 4 Sasaran Unit Kegiatan Keuangan dan Umum



Gambar 5 Sasaran Unit Kegiatan Kepegawaian dan Ortala



Gambar 6 Sasaran Unit Kegiatan Hukum dan Kerja Sama Teknik

Tabel 8 Target Indikator Unit Kegiatan Setditjen PHLHK tahun 2015 – 2019

Kegiatan/ Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target					
			2015	2016	2017	2018	2019	
Program dan Evaluasi	Terselenggara nya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK	Jumlah capaian sasaran indikator program dan indikator kegiatan	95%	95%	95%	95%	95%	
		Nilai SAKIP Dirjen PHLHK	70	72	74	76	78	
		Jumlah satker yang terselenggara program dan kegiatan	52	78	10	10	10	
	Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah berita media mengenai Kegiatan Penegakan Hukum LHK kepada masyarakat	60	80	100	110	120	
		Jumlah media kampanye/pameran PPLHK melalui media cetak, elektronik, tradisional dan sosial	12	12	12	12	12	
	Tercapainya data dan Informasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah satker yang memiliki sistem informasi berfungsi memenuhi standar minimal setiap tahun	1	1	10	10	10	
		Jumlah Publikasi penegakan Hukum LHK	80	85	90	95	100	
		Tersedianya bahan kerja pimpinan PHLHK	12	12	12	12	12	
	Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Meningkatnya daya saing SDM Dirjen Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan	Tersedianya Polisi Hutan, PPNS, PPLH dalam mendukung PHLHK dan SDM PHLHK kompeten	3175	3225	3275	3325	3375
			Jumlah PPLH memenuhi kebutuhan untuk pengawasan	138	188	238	288	338
Jumlah PPNS memenuhi kebutuhan untuk penyidikan dalam rangka penegakan			154	204	254	304	354	

Kegiatan/ Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
		hukum					
		Jumlah SDM PHLHK yang meningkat kompetensinya	208	238	268	298	328
	Tersusunnya Struktur Organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif dan efisien	Jumlah UPT penegakan hukum yang efektif dan efisien	51	77	5	5	5
Keuangan dan Umum	Meningkatnya administrasi keuangan Ditjen PHLHK secara efektif	Opini WTP untuk laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK	Jumlah Manajemen Aset	1	1	1	1	1
		Jumlah sarana dan peralatan LHK terdistribusi di satker dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK	135		176	198	
Hukum dan Kerja Sama Teknik	Tersedianya rancangan aturan dan NSPK terkait Ditjen PHLHK	Jumlah rancangan Kebijakan strategis	2	2	2	2	2
		Jumlah NSPK	5	5	5	5	5
	Tersedianya bantuan hukum Ditjen PHLHK	Jumlah bantuan hukum Ditjen PHLHK	5	5	7	8	10
	Terselenggarakannya kerjasama teknis dalam meningkatkan efektifitas kegiatan PHLHK	Jumlah kerjasama teknis dalam negeri terkelola	1	2	3	3	4
		Jumlah kerjasama teknis luar negeri terkelola	2	3	4	5	5

B. RENCANA KERJA SETDITJEN PHLHK 2019

Rencana Strategis Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 disusun berdasarkan Renstra PHLHK tahun 2015 -2019 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan diturunkan menjadi Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. Rencana kerja ini memuat arah kebijakan Setditjen PHLHK selama Tahun 2019 sebagai komitmen dalam pencapaian sasaran strategis jangka menengah dan jangka panjang. Rencana Kerja ini juga menjadi acuan menetapkan Indikator Penilaian Kinerja sebagai instrumen mengukur kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Indikator Penilaian Kinerja (IPK) Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai mana dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019, terdiri atas:

Tabel 9 Rencana Kinerja Setditjen PHLHK Tahun 2019

Kegiatan/ Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2019	
			Volume	Satuan
<i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>				
Program dan Evaluasi	Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK	Jumlah capaian sasaran indikator program dan indikator kegiatan	95%	Persen
		Nilai SAKIP Dirjen PHLHK	76	Poin
		Jumlah satker yang terselenggara program dan kegiatan	10	Satker
	Meningkatnya cakupan dan penet'rasian komunikasi dan kampanye Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah berita media mengenai Kegiatan Penegakan Hukum LHK kepada masyarakat	120	Berita Media
		Jumlah media kampanye/pameran PPLHK melalui media cetak, elektronik, tradisional dan sosial	12	Media Kampanye
	Tercapainya data dan Informasi Penegakan	Jumlah satker yang memiliki sistem informasi berfungsi memenuhi standar minimal setiap	10	Aplikasi

Kegiatan/ Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2019	
			Volume	Satuan
	Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	tahun		
		Jumlah Publikasi penegakan Hukum LHK	100	Kali
		Tersedianya bahan kerja pimpinan PHLHK	12	bahan
Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Meningkatnya daya saing SDM Dirjen Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan	Tersedianya Polisi Hutan, PPNS, PPLH dalam mendukung PHLHK dan SDM PHLHK kompeten	3375	Orang
		Jumlah PPLH memenuhi kebutuhan untuk pengawasan	338	Orang
		Jumlah PPNS memenuhi kebutuhan untuk penyidikan dalam rangka penegakan hukum	354	Orang
		Jumlah SDM PHLHK yang meningkat kompetensinya	328	Orang
	Tersusunnya Struktur Organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif dan efisien	Jumlah UPT penegakan hukum yang efektif dan efisien	5	UPT
Keuangan dan Umum	Meningkatnya administrasi keuangan Ditjen PHLHK secara efektif	Opini WTP untuk laporan keuangan	WTP	Dokumen
	Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK	Jumlah Manajemen Aset	1	Dokumen
		Jumlah sarana dan peralatan LHK terdistribusi di satker dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK	241	Unit
Hukum dan Kerjasama Teknik	Tersediannya rancangan aturan dan NSPK terkait Ditjen PHLHK	Jumlah rancangan Kebijakan strategis	2	Dokumen
		Jumlah NSPK	5	Dokumen
	Tersedianya bantuan hukum ditjen PHLHK	Jumlah bantuan hukum ditjen PHLHK	10	Perkara
	Terselenggarakannya kerjasama teknis dalam meningkatkan efektifitas kegiatan PHLHK	Jumlah kerjasama teknis dalam negeri terkelola	4	MoU
		Jumlah kerjasama teknis luar negeri terkelola	5	MoU

C. PERJANJIAN KINERJA 2019

Penetapan Kinerja (PK) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan dokumen yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimilikinya. Tujuan penetapan kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Indikator Penilai Kinerja (IPK) Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2018 yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Perjanjian Kinerja Setditjen PHLHK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK	Sakip Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 78.00 (A) di tahun 2019	76 poin

Alokasi Anggaran untuk sasaran strategis Setditjen PHLHK adalah Rp. 50.579.285.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara *reviu* atas laporan kinerja instansi pemerintah.

A. PENGUKURAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala bulanan, triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran unit kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Setditjen PHLHK dengan realisasi masing-masing indikator unit kegiatan. Secara keseluruhan sebagian besar tingkat capaian kinerja Setditjen PHLHK selama tahun 2019 telah memenuhi target. Dari 21 Indikator unit kegiatan untuk 10 sasaran kegiatan, 15 indikator unit diantaranya telah mencapai dan melebihi target, sedangkan 6 indikator unit lainnya masih di bawah target, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 Pengukuran capaian kinerja Setditjen PHLHK tahun 2019

NO	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
I	Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK	Jumlah capaian sasaran indikator program dan indicator kegiatan	95%	98%	103%
		Nilai SAKIP Dirjen PHLHK	76	76.64	101%
		Jumlah satker yang terselenggara program dan kegiatan	10	10	100 %
II	Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye PHLHK	Jumlah berita media mengenai kegiatan PHLHK kepada masyarakat	120	102	85%
		Jumlah media kampanye/pameran PHLHK melalui media cetak elektronik, tradisional dan social	12	9	75%
III	Tercapainya data dan informasi PHLHK	Jumlah satker yang memiliki sistem informasi berfungsi memenuhi standar minimal setiap tahun	10	10	100 %
		Jumlah publikasi PHLHK	100	129	129%
IV	Meningkatnya daya saing SDM Dirjen PHLHK	Tersedianya Polisi Hutan, PPNS, PPLH dalam mendukung PHLHK dan SDM PHLHK Kompeten	3375	2470	73%
		Jumlah PPLH memenuhi kebutuhan untuk pengawasan	338	146	43%
		Jumlah PPNS memenuhi kebutuhan untuk penyidikan dalam rangka penegakan hukum	354	210	59%
		Jumlah SDM PHLHK yang meningkat kompetensinya	328	1506	459%
V	Tersusunnya Struktur Org. dan tata kerja yang proporsional, efektif dan efisien	Jumlah UPT penegakan hukum yang efektif dan efisien	5	5	100%
VI	Meningkatnya administrasi keuangan Ditjen PHLHK secara efektif	Opini WTP untuk laporan keuangan	WTP	WDP	75%
VII		Jumlah manajemen Aset	1	1	100 %

NO	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
	Terselenggaranya pengelolaan ketausahaan, kerumahtangaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK	Jumlah sarana dan peralatan LHK terdistribusi di satker dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK	241	241	100%
VIII	Tersedianya rancangan aturan dan NSPK terkait Ditjen PHLHK	Jumlah rancangan kebijakan strategis	2	4	100%
		Jumlah NSPK	5	1	100%
IX	Tersedianya bantuan hukum Ditjen PHLHK	Jumlah bantuan hukum Ditjen PHLHK	10	15	150%
X	Terselenggaranya kerjasama teknis dalam meningkatkan efektifitas kegiatan PHLHK	Jumlah kerjasama teknis dalam negeri terkelola	4	10	266%
		Jumlah kerjasama teknis luar negeri terkelola	5	5	100%

B. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Pengukuran efektivitas capaian kinerja sasaran Tahun 2019 dilakukan melalui perbandingan dengan capaian kinerja Tahun 2018. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2019.

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian kinerja fisik tahun berjalan}}{\text{Capaian kinerja fisik tahun sebelumnya}}$$

Kriteria yang dijadikan pedoman efektivitas pencapaian kinerja, yaitu:

- 1) Rasio perbandingan > 1, artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya;
- 2) Rasio perbandingan = 1, artinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja tahun 2019, tetap/sama dengan tahun sebelumnya dan sama dengan kinerja tahun 2018.
- 3) Rasio perbandingan < 1, menunjukkan efektivitas pencapaian kinerja menurun, artinya efektifitas kinerja 2019 lebih rendah dibandingkan efektivitas kinerja 2018.

Pengukuran efisiensi capaian kinerja sasaran Tahun 2019 dilakukan melalui perbandingan dengan capaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2019. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2018.

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian kinerja fisik tahun berjalan}}{\text{Capaian kinerja keuangan tahun berjalan}}$$

Kriteria yang dijadikan pedoman efisiensi pencapaian kinerja, yaitu:

- 1) Rasio perbandingan > 1 atau $= 1$, artinya dalam pencapaian kinerja tahun 2019 berjalan secara efisien.
- 2) Rasio perbandingan < 1 , menunjukkan efisiensi pencapaian kinerja kurang efisien artinya dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2019 anggaran yang diserap belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja tahun 2019.

C. EVALUASI KINERJA

Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di waktu yang akan datang. Dalam upaya meminimalisasi bias dalam perhitungan capaian kinerja sasaran, Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi arahan bahwa khusus untuk sasaran yang memiliki tingkat capaian kinerja yang melebihi 150%, diasumsikan capaiannya maksimal sebesar 150%.

D. ANALISIS CAPAIAN SASARAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019, ditetapkan indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PHLHK adalah SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 76 poin.

Instrumen untuk mengukur indikator kinerja program tersebut terdiri dari 10 instrumen sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 12 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Ditjen PHLHK

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	SASARAN PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK (K5)			
II	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :			
a.	SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K5.IKK.a)	76 Poin	76,64 Poin	101 %

Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan kegiatan teknis Ditjen PHLHK tahun 2019 ini dilaksanakan pada 10 (sepuluh) satuan kerja, yang meliputi penyediaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta perangkat operasional lainnya seperti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Guna terlaksananya tata kelola birokrasi penegakan hukum maka ditetapkan 10 indikator kinerja kegiatan. Pada tahun 2019, pengukuran kinerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret s.d 5 April 2019 dengan Nilai 76,64 poin (101%). Beberapa indikator unit kegiatan yang mendukung tercapainya hal-hal tersebut adalah:

1. Bagian Program Dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pada bagian Program dan Evaluasi tahun 2018 meliputi : a) terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK, b) Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye PHLHK dan c) tercapainya data dan informasi PHLHK, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 13 Pengukuran unit kegiatan Bagian Program dan Evaluasi

NO	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
I	Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK	Jumlah capaian sasaran indikator program dan indikator kegiatan	95%	95%	100%
		Nilai SAKIP Dirjen PHLHK	76	76,64	101%
		Jumlah satker yang terselenggara program dan kegiatan	10	10	100 %
II	Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye PHLHK	Jumlah berita media mengenai kegiatan PHLHK kepada masyarakat	110	102	92,7%
		Jumlah media kampanye/pameran PHLHK melalui media cetak elektronik, tradisional dan social	12	9	75%
III	Tercapainya data dan informasi PHLHK	Jumlah satker yang memiliki sistem informasi berfungsi memenuhi standar minimal setiap tahun	10	10	100 %
		Jumlah publikasi PHLHK	100	129	129%

a) Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi LHK

Selama tahun 2019 kegiatan perencanaan telah berhasil menyelesaikan DIPA untuk 10 satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Sebelumnya pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK membawahi 52 Satuan Kerja sedangkan tahun 2016 sebanyak 77 Satuan kerja akibat DIPA Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK masih bergabung dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Rencana Kerja Tahun 2019 telah ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang terdiri dari 1 (satu) PK Sekretariat, 4 (empat) PK Direktorat Teknis ditambah 5 PK Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK. Sementara itu Rencana Kerja Tahun 2020 Direktorat Jenderal/Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK mengacu pada RKP Tahun 2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor

2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja Ditjen/ Setditjen Penegakan Hukum LHK Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 September 2019 di Jakarta adalah dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2019 merupakan dasar penyusunan dokumen RKA-K/L Tahun 2020 yang berkualitas, efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja penegakan hukum LHK yang telah tertera dalam dokumen Rencana Strategis Penegakan Hukum LHK. Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Tersusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2020 satker lingkup Ditjen PHLHK;
2. Melakukan reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun 2020 satker lingkup Ditjen. PHLHK.

Kegiatan penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2019 dilaksanakan selama 3 kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rapat Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif TA 2020 Ditjen PHLGK di Hotel Wimarion Semarang tanggal 4-6 Juli 2019
2. Rapat Penyelesaian Catatan Hasil Penelitian dan Reviu atas Usulan RKA-K/L Pagu Anggaran Ditjen PHLHK Tahun 2020 di Hotel D'ANAYA Bogor Jawa Barat Tanggal 25-26 Juli 2019
3. Rapat Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PHLHK TA.2020 di Hotel Soll Marina Serpong Tangerang Selatan Tanggal 26 - 29 September 2019

Hasil dari kegiatan tersebut adalah:

1. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan keluaran pada RKA-K/L setiap satker lingkup Ditjen Penegakan Hukum LHK sudah sesuai;
2. Penerapan kaidah-kaidah penganggaran pada RKA-K/L setiap satker lingkup Ditjen Penegakan Hukum LHK telah sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan;
3. Seluruh dokumen pendukung telah dilengkapi;
4. Konsistensi kesesuaian dengan RKP dan Rencana kerja K/L;
5. Kesesuaian dengan pagu anggaran;

6. Kesesuaian dengan Alokasi Anggaran K/L;
7. Biaya Pemeliharaan dan Sarana Perkantoran telah sesuai dengan matrik pagu anggaran tahun 2020;
8. Pengalokasian anggaran untuk keperluan biaya pemeliharaan gedung dan kantor telah sesuai dengan SBM tahun 2020;
9. Terbitnya ADK RKA-K/L Tahun 2020

Dalam rangka penguatan perencanaan anggaran di Ditjen PHLHK serta memperkuat koordinasi antar satker maka dibentuk kelompok kerja perencanaan anggaran Ditjen PHLHK Tahun 2019 yang bertujuan untuk menyusun rencana kerja semester, triwulan dan bulanan.

Capaian nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Inspektorat Jenderal Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 adalah sebesar nilai 76,64 poin (Sangat Baik) dengan capaian kinerja sebesar 101% atas penilaian SAKIP, lebih baik jika dibandingkan dengan penilaian SAKIP Ditjen PHLHK tahun 2018 dengan perolehan nilai 72,58 poin dengan capaian kinerja sebesar 98% atau predikat BB (Sangat Baik), dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 14 Nilai SAKIP Ditjen PHLHK tahun 2015 dan 2019

No.	Kriteria	Skor Tertinggi	Nilai Skor PHLHK 2015	Nilai Skor PHLHK 2016	Nilai Skor PHLHK 2017	Nilai Skor PHLHK 2018	Nilai Skor PHLHK 2019
1	Perencanaan Kinerja	30	17,37	25.25	24.76	22.08	24.03
2	Pengukuran Kinerja	25	15,46	18.53	16.75	10.12	17.14
3	Pelaporan Kinerja	15	7,50	10.96	10.63	6.02	12.02
4	Evaluasi Kinerja	10	10	6.53	5.61	9.33	9.08
5	Capaian Kinerja	20	17	14.71	12.68	11.67	14.38
TOTAL		100	61,42	75.98	70.43	72.58	76.64

Tabel 15 Capaian Nilai SAKIP Ditjen PHLHK Tahun 2015-2018

No.	Tahun	Target	Nilai SAKIP	%	Predikat	Interpretasi
1.	2014		61,42	87,74	B	Baik
2.	2015	70	75.98	109	BB	Sangat Baik
3.	2016	72	70.43	98	BB	Sangat Baik
4.	2017	74	72.58	98	BB	Sangat Baik
5.	2018	76	76.64	101	BB	Sangat Baik

Meskipun hasil evaluasi SAKIP Ditjen PHLHK Tahun 2019 dikategorikan sangat baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan pada beberapa komponen. Adapun beberapa rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK terhadap kelemahan tersebut antara lain:

- (1) Melakukan reviu terhadap Renstra eselon I dan Eselon II;
- (2) Mempublikasikan Perencanaan Kinerja eselon I, IKU dan LKj pada website Ditjen PHLHK;
- (3) Menyempurnakan dokumen Rencana Aksi yang menggambarkan pemenuhan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkala;
- (4) Menyusun SOP yang memadai dengan kriteria;
 - a. SOP pengumpulan data yang up to date
 - b. Kemudahan menelusuri sumber data
 - c. Kemudahan mengakses data bagi pihak yang berkepentingan
 - d. SOP yang jelas jika ada kesalahan data
- (5) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi secara berkala, dan menindaklanjuti perbaikan rencana aksi untuk capaian kinerja dalam bentuk langkah nyata.

Ditjen PHLHK telah menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan Inspektorat Jenderal, melalui:

- a. Membuat perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja yang berjenjang hingga tingkat individu berupa SKP
- b. Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada LKj tahun 2018
- c. Melaksanakan Rencana Aksi pada setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja.

Pengendalian internal Lingkup Setditjen Penegakan Hukum LHK telah dilaksanakan dengan membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan hasil penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh BPKP, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal PHLHK berada pada level 3 kategori terdefinisi atau tercapai lebih cepat (satu) tahun dari target dalam RPJM Tahun 2015 – 2019.

Berdasarkan Validasi BPKP penilaian maturitas dilakukan terhadap 5 Unsur SPIP dan 25 sub unsurnya, pada 13 Satker setingkat eselon I, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK mendapat nilai 3,074 pada level 3 katagori terdefinisi sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 16 Hasil Validasi Penilaian Maturitas SPIP per Eselon I

NO	SATKER	Nilai
1.	Itjen	3,17
2.	Sekjen	2,924
3.	Ditjen PKTL	3,12
4.	Ditjen KSDAE	2,887
5.	Ditjen PDASHL	3,082
6.	Ditjen PHPL	3,034
7.	Ditjen PPKL	3,037
8.	Ditjen PSLB3	3,037
9.	Ditjen PPI	3,074
10.	Ditjen PSKL	3,074
11.	Ditjen PHLHK	3,074
12.	Ditjen BPPSDM	3,074
13.	BPPI	3,147
14.	KLHK	3,037

Beberapa upaya untuk meningkatkan maturitas SPIP ke tingkat berikutnya adalah evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian serta melakukan pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan operasional sehari-hari dan mendokumentasikannya.

Sesuai dengan amanat undang-undang DPR RI mempunyai tugas untuk mengawal kegiatan yang ada pada pemerintahan guna melihat kegiatan yang ada sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan. Rapat Kerja Bersama DPR RI dilakukan bersama Komisi IV DPR RI dan Komisi VII DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan sebanyak 16 kali, baik rapat kerja maupun rapat dengar pendapat Komisi IV dan VII DPR RI.

b) Tercapainya data dan informasi PHLHK

Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK selaku pusat pengolahan data dan informasi dari seluruh Direktorat Teknis lingkup Ditjen PHLHKLHK melakukan pertemuan dengan media massa. Pelaksanaan Teleconference selama tahun 2019 sebanyak 102 kali dengan rata-rata dihadiri oleh 50 media massa nasional seperti Bisnis Indonesia, Harian Indonesia, Jawa Pos, Kompas, Koran Jakarta, Koran Tempo, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Republika, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaharuan, The Jakarta Post, Warta Kota, Koran Sindo, Lampung Pos, Medan Bisnis, Palembang Pos, Riau Pos, Harian Sinar Indonesia Baru, Sriwijaya Post, Bali Post, Bandung Ekspres, Kedaulatan Rakyat, Pikiran Rakyat, Pasundan Ekspres, Radar Bandung, Radar Banten, Radar Bogor, Radar Cirebon, Radar Jogja, Radar Semarang, Suara Merdeka, Surabaya Post, Surya, Harian Jogja, Banjarmasin Pos, Harian Berita Kota Makasar, Magelang Ekspres, Media Indonesia, Koran Sindo, Sumatera Ekspres, Berita Pagi, Metro TV, Trans 7, ANTV, TVOne, MNC TV, Global TV, RCTI, iNews TV, TA TV, Kompas TV, Bali TV, JTV, Berita Satu News Channel (TV), Radio Elshinta, RRI, Radio PR FM Bandung, Radio Sindotrijaya FM, Radio KBR, Radio Suara Surabaya, LKBN Antara, Detik.com, Viva.co.id, Metronewstv.com, RMOL.co, Arah.com., Radio Elshinta, RRI Jateng, RRI Jabar, RRI Kalbar, RRI Sumut, RRI Jatim, RRI Banten, RRI Banjarmasin, Radio KBR, Radio DMS Ambon, Radio Pronews FM, Indosiar, Trans TV, TVRI, TVRI Jateng, TVRI Bandung, TVRI Banten, TVRI Medan, TVRI Pontianak, TVRI Lampung, TVRI Pekanbaru, Net TV, Tempo, Matra, Detik, Radar, Berita Satu, Gatra, Nasional Giografis.

Selanjutnya pengelolaan informasi juga dilakukan dengan melaksanakan peliputan kegiatan-kegiatan penegakan hukum di lokasi kejadian. Peliputan ini

dilaksanakan sebanyak 14 kali antara lain; Surabaya, Bogor, Bandung, Cianjur, Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Palembang, Samarinda, Bali. Peliputan ini rata rata menyertakan beberapa media cetak nasional dan media TV nasional antara lain yaitu; Metro TV, CNN, Tempo, Berita Satu, Kompas, Media Indonesia, Suara Pembaharuan, The Jakarta Post, TV One, News TV, TVRI, Trans TV, Trans 7, Detik, Republika, Rakyat Merdeka, dan lain-lain.

- c) Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye PHLHK**
- Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum mengembangkan sistem komunikasi dengan publik berupa Sosial Media (facebook, twitter dan Istagram). Melalui Facebook, Twitter, dan Instagram Gakkum LHK telah mendapat 32.716 follower Facebook, 6.641 follower di Twitter dan 11.679 follower di Instagram. Publikasi melalui medsos diatas sebanyak 129 konten penegakan hukum.

Peningkatan kapasitas publik dalam penegakan hukum melalui kampanye penegakan hukum berupa Pameran sebanyak 9 kali, antara lain:

1. Pameran Indo Green Environment dan Forestry Expo 2019 dilaksanakan di Celebes Convention Center Kota Makasar, Sulawesi Selatan pada tanggal 4 – 7 April 2019
2. Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PLHK) ke-23 tahun 2019 dilaksanakan di Gedung Cendrawasih Hall, Jakarta Covention Center (JCC) pada tanggal 11 – 13 Juli 2018
3. *Indonesian Green Growth Trade dan Fair sebagai penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan* dilaksanakan di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang, Kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 26 – 28 Juni 2019
4. Gakkum Festival dilaksanakan di Manggala Wanabakti pada tanggal 23 – 25 juli 2019 merupakan bentuk apresiasi sekaligus publikasi kinerja 5 tahun Ditjen PHLHK sejak terbentuk pada bulan Juli tahun 2015.
5. Pameran Konservasi Alam Nasional (HKAN) dilaksanakan pada tanggal 5 – 8 Agt 2019 di Taman Wisata Alam (TWA) Muka Kuning, Kota Batam (karena mempunyai hutan yang berada di tengah kota industry Batam
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 29 Agustus 2019. Beragam Inovasi dan kinerja Kementerian LHK periode

tahun 2015-2019 ditampilkan pada acara Gelar Kebangsaan Tahun 2019

7. Pameran *9th Indonesia Climate Change Forum dan Expo 2019* dilaksanakan pada tanggal 5 - 7 September 2019 di Santika Premiere Dyandra Hotel dan Convention, Medan, Sumatera Utara
8. Pameran Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Tahun 2019 diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 23 – 25 Oktober 2019 di Alun – Alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Pameran Pertikawan dilaksanakan pada tanggal 18 – 24 November 2019 di Buperta Cibubur.

Pada tahun 2019 terdapat 10 satker yang memiliki sistem informasi yang memenuhi standar minimal. Selain itu terdapat beberapa aplikasi yang dikembangkan secara mandiri oleh Ditjen PHLHK dalam pelaporan Data dan Informasi, antara lain Pengaduan, Sanksi Administrasi, Onduty, Dashboard GIS, SPARTAN, ECM (digitalisasi dokumen).

Sistem Intelligence Center yang telah dibangun di kantor pusat pada tahun 2019 telah beroperasi juga di kantor seksi, yakni di Kantor Seksi Wilayah Pontianak Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dan Kantor Seksi Wilayah Palembang Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera. Pembangunan intelligence center di kedua lokasi tersebut telah selesai dilaksanakan dan saat ini sudah mulai beroperasi dasar. Telah dilaksanakan evaluasi administrasi dan teknis pada kedua kantor tersebut. Tahun depan direncanakan keduanya telah dapat beroperasi penuh dalam menunjang pelaksanaan tugas kedua kantor seksi dan balai.

2. Bagian Keuangan Dan Umum

Pelaksanaan kegiatan pada Bagian Keuangan dan Umum tahun 2018 meliputi:

- a) meningkatnya administrasi keuangan Ditjen PHLHK secara efektif;
- b) Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan Ditjen PHLHK; dan
- c) tersedianya rancangan aturan dan NSPK terkait Ditjen PHLHK, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 17 Pengukuran unit kegiatan keuangan dan umum

NO	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
I	Meningkatnya administrasi keuangan Ditjen PHLHK secara efektif	Opini WTP untuk laporan keuangan	WTP	WDP	75%
II	Terselenggaranya pengelolaan ketausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK	Jumlah manajemen Aset	1	1	100 %
		Jumlah sarana dan peralatan LHK terdistribusi di satker dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK	241	241	100%

a) Meningkatnya administrasi keuangan Ditjen PHLHK secara efektif

Pencapaian kinerja unit kegiatan Bagian Keuangan dan Umum memiliki sasaran meningkatnya administrasi keuangan Ditjen PHLHK secara efektif melalui indikator Opini WTP untuk laporan keuangan. Laporan Keuangan Kementerian LHK tahun 2019, berhasil memperoleh Opini WTP. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut berupa perbaikan pengelolaan keuangan negara termasuk pengelolaan BMN, perbaikan dalam penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan anggaran Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp. 50.579.285.000,- dengan realisasi 50.153.608.367,- atau 99,16 % sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 18 Realisasi SetDitjen PHLHK dari 2015 - 2019

<i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK</i>				
NO	TAHUN	PAGU	REALISASI	%
1	2015	85.358.870.000	67.589.154.128	78,90
2	2016	74.714.315.000	74.193.880.349	99,30
3	2017	45.706.827.000	43.789.770.261	95,81
4	2018	44.859.148.000	43.957.549.104	97,99
5	2019	50.579.285.000	50.153.608.367	99,16

Tabel 19 Realisasi SetDitjen PHLHK2019

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
12	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.579.285.000	50.153.608.367	99,16
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK	50.579.285.000	50.153.608.367	99,16
5427.950	Layanan Dukungan manajemen Eselon I	18.246.000.000	17.955.921.659	98,41
5427.950.001	Tanpa sub output	18.246.000.000	17.955.921.659	98,41
051	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	3.030.000.000	3.005.433.108	99,19
A	Penyusunan Rencana Kerja Ditjen/Setditjen PHLHK Tahun 2020	156.457.000	156.158.300	99,81
B	Kelompok Kerja Sinkronisasi Perencanaan Anggaran Ditjen PHLHK	150.741.000	147.992.000	98,18
C	Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang PHLHK Tahun 2020	428.081.000	425.235.100	99,34
D	Penyusunan Revisi Anggaran dan APBNP Tahun 2019	184.052.000	183.801.500	99,86
E	Rapat Kerja Bersama Instansi/Pihak Terkait	378.982.000	373.386.400	98,52
F	Penyusunan Anggaran Tahun 2020	420.919.000	420.306.500	99,85
H	Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen PHLHK	43.221.000	42.950.000	99,37
I	Rapat Rencana Kegiatan Semester I dan Semester II tahun 2019 Ditjen PHLHK	251.297.000	250.988.800	99,88
J	Koordinasi/Supervisi/Pembinaan Bidang Program dan Anggaran	328.428.000	323.901.508	98,62
K	Penyusunan Rencana Strategis Ditjen Penegakan Hukum LHK Tahun 2020-2024	17.814.000	17.580.000	98,69
L	Bimbingan Teknis dan Penyegaran Operator RKA-K/L Ditjen PHLHK Tahun 2019	216.935.000	216.922.800	99,99
M	Penyusunan RPJMN Ditjen Penegakan Hukum LHK Tahun 2020-2024	443.563.000	436.701.600	98,45
N	Rapat Koordinasi Anggaran Dekonsentrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020	9.510.000	9.508.600	99,99
052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	2.739.230.000	2.714.001.722	99,08
A	Kegiatan Monev dan Pengumpulan Data Pelaksanaan Gakkum 2018	128.365.000	123.620.174	96,30
B	Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018	32.530.000	32.251.310	99,14

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
C	Rakor Evaluasi Kinerja Penegakan Hukum LHK	78.670.000	68.750.600	87,39
D	Pelaksanaan SPIP Setditjen PHLHK	58.429.000	58.315.500	99,81
E	Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen dan SetDitjen PHLHKLHK Tahun 2018	800.000	767.360	95,92
H	Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHLHK Tahun 2018	11.290.000	10.609.740	93,97
I	Penyebarluasan Informasi Bidang PHLHK	1.051.991.000	1.048.948.215	99,71
L	Pengujian Data dan Analisis Lapangan	193.000.000	190.860.200	98,89
M	Sinkronisasi dan Koordinasi Data dan Informasi Ditjen Gakkum	282.127.000	280.285.100	99,35
N	Pengayaan dan akuisisi data Gakkum LHK	19.400.000	19.387.689	99,94
O	Pelaporan / Telaahan Tematik	15.000.000	15.000.000	100,00
P	Kampanye/Pameran Gakkum	867.628.000	865.205.834	99,72
054	Pengelolaan keuangan	1.957.000.000	1.928.337.096	98,54
A	Rekonsiliasi dan Konsolidasi laporan keuangan PHLHK	149.700.000	147.914.500	98,81
B	Penyusunan Laporan Keuangan PHLHK	428.947.000	425.616.691	99,22
C	Koordinasi dan pembinaan keuangan bagian pelaksanaan anggaran	609.780.000	604.151.315	99,08
D	Penyegaran BP dan BPP Satker Lingkup Ditjen PHLHK	103.531.000	95.665.500	92,40
E	Tindak lanjut hasil audit	174.330.000	172.840.750	99,15
F	In house training pengelola keuangan	136.980.000	132.484.100	96,72
G	Sertifikasi pengelola anggaran	210.282.000	208.220.200	99,02
H	Monitoring Evaluasi Laporan Keuangan Triwulan III dan Semester II Tahun 2019 Satker Ditjen PHLHK (Revisi DJA)	143.450.000	141.444.040	98,60
056	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	3.200.400.000	3.154.532.826	98,57
A	Penyusunan Rancangan Perundang-Undangan	208.665.000	208.332.940	99,84
B	Rumusan Kajian Hukum	332.940.000	332.416.964	99,84
C	Pendampingan dalam rangka Penyelesaian Kasus LHK	685.615.000	684.109.082	99,78
D	Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri	203.850.000	202.989.985	99,58
E	Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri	1.492.285.000	1.484.571.055	99,48
F	Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Teknik	277.045.000	242.112.800	87,39
057	Pengelolaan kepegawaian	3.383.048.000	3.306.303.599	97,73
A	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	274.482.000	261.256.170	95,18

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
B	Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional	702.401.000	696.905.640	99,22
C	Peningkatan Kapasitas Ditjen PHLHK	1.398.219.000	1.379.067.989	98,63
D	Penyelenggaraan Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis	98.040.000	98.030.000	99,99
E	In House Training Penataan Arsip Kepegawaian	55.985.000	55.984.800	100,00
F	Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jenjang Madya Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (Revisi DJA)	420.940.000	411.689.000	97,80
G	Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jenjang Muda Jabatan Fungsional Pengawas LH (Revisi DJA)	432.981.000	403.370.000	93,16
058	Pelayanan umum dan perlengkapan	3.033.800.000	2.971.640.591	97,95
A	Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan BMN Satker Setditjen PHLHK	139.149.000	138.675.000	99,66
B	Penyusunan Laporan BMN	139.928.000	138.049.800	98,66
C	Penyusunan RKBMN Ditjen PHLHK	98.841.000	97.480.000	98,62
D	Koordinasi Pengelolaan BMN Ditjen PHLHK	446.150.000	433.770.437	97,23
E	Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN	128.110.000	127.302.800	99,37
F	Diklat dan Sertifikasi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	146.050.000	145.805.000	99,83
G	Pengelolaan Surat/Dokumen Dinas	64.523.000	63.668.690	98,68
H	Penataan arsip surat lingkup Setditjen PHLHK	129.700.000	121.726.438	93,85
I	Evaluasi Tata Naskah Dinas Lingkup Setditjen PHLHK	368.520.000	360.970.630	97,95
J	Administrasi layanan operasional pimpinan	704.120.000	697.219.570	99,02
K	Penyusunan Standar Sarpras Ditjen PHLHK	125.000.000	123.775.000	99,02
L	Sarana dan Prasarana Ditjen PHLHK	268.393.000	263.592.700	98,21
M	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi BMN Satker Ditjen PHLHK (Revisi DJA)	275.316.000	259.604.526	94,29
061	Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	902.522.000	875.672.717	97,03
A	Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana	460.041.000	449.206.317	97,64
B	Usulan Revisi Peraturan Jabatan Fungsional Polhut dan Pengawas LH	54.320.000	49.280.000	90,72
C	Penyusunan Juklak Jabatan Fungsional Polhut dan Pengawas LH	105.626.000	104.448.000	98,88
D	Penyusunan ABK, Anjab dan Evajab	74.885.000	73.282.400	97,86
E	Penyusunan NSPK Ditjen PHLHK	64.430.000	62.756.000	97,40
F	Penyusunan SKP, E-Kinerja Ditjen PHLHK	143.220.000	136.700.000	95,45

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
5427.95 1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	3.500.000.000	3.470.272.743	99,15
5427.99 4	Layanan Perkantoran [Base Line]	28.833.285.000	28.727.413.965	99,63

a) Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK

a. Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Umum

Pengelolaan Surat / Dokumen Dinas

Pengelolaan surat atau dokumen dinas pada Setditjen PHLHK tahun 2019 dikerjakan secara elektronik dan menggunakan internet serta bukti dukung dalam bentuk hasil pemindaian surat. Pekerjaan kantor yang selama ini dilakukan secara manual telah berubah menjadi elektronik untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi; pengembangan budaya nilai dan perilaku kerja yang positif; penyederhanaan sistem, prosedur, mekanisme dan kontrol kerja yang efektif; meningkatkan mutu layanan administrasi. Pengelolaan surat/arsip ditampilkan pada Tabel 20 berikut.

Tabel 20 Pengelolaan surat/arsip

NO	DOKUMEN	Kode	Ditjen		Setditjen	
			2018	2019	2018	2019
1	Surat Dinas	S	191	313	1060	977
2	Nota Dinas	ND	136	166	797	646
3	Surat Izin	Si	-	-	8	-
4	Surat Tugas	ST	371	231	755	774
5	Surat Keterangan	KT	6	7	40	20
6	Surat Edaran	SE	3	1	2	6
7	Peraturan	P	7	5	0	2
8	Sertifikat	SF	35	-	17	32
9	Surat Keputusan	SK	232	502	67	66
10	Berita Acara	BA	-	3	5	9
11	Berita Sertijab	BJ	3	-	15	30

NO	DOKUMEN	Kode	Ditjen		Setditjen	
			2018	2019	2018	2019
12	Perjanjian Kerjasama	PKS	-	3	25	29
13	Perintah Tugas	PT	33	20	20	16
14	Memorandum	M	2	14	9	1
15	Surat melaksanakan Tugas	SMT	5	-	34	10
16	Surat Pernyataan Pelantikan	SMP	4	-	1	8
17	Surat Melaksanakan Jabatan	SMJ	1	-	1	8
18	Surat Pengantar	SP	-	-	1	1
19	Surat Pangilan	SG	-	-	1	3
20	Prosedur tetap	PTA	-	-	1	0
21	Surat Undangan	S	30	46	514	541

Terkait dengan penyediaan sarana dan prasana perkantoran dan kebutuhan pegawai, selama tahun 2019 telah disediakan peningkatan sarana dan prasarana SetDitjen PHLH yang terdiri dari:

Tabel 21 Sarana dan Prasarana Setditjen PHLHK Tahun 2019

PEMBELIAN ASET

NO	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	NILAI
1	PERALATAN DAN MESIN			
1	Pompa Air	Unit	2	9,900,000
2	Jeep	Unit	1	649,300,000
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	246,490,800
4	Sepeda Motor	Unit	5	124,495,000
5	Mesin Pompa air PMK	Buah	2	1,550,000
6	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	2	6,912,000
7	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	1,762,500
8	Lemari Kayu	Buah	2	102,322,000
9	Rak Besi	Buah	1	45,302,400
10	Brandkas	Buah	1	11,390,000
11	CCTV - Camera Control Television System	Buah	17	57,588,500
12	LCD Projector/Infocus	Buah	2	105,939,650
13	Perkakas Kantor Lainnya	Buah	1	1,650,000
14	Alat Kantor Lainnya	Buah	5	179,624,375

NO	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	NILAI
15	Meja Rapat	Buah	2	8,115,250
16	Meubelair Lainnya	Buah	1	3,800,000
17	Jam Elektronik	Buah	1	4,730,000
18	A.C. Split	Buah	2	17,902,500
19	Kipas Angin	Buah	1	1,113,750
20	Televisi	Buah	2	12,982,300
21	Wireless	Buah	1	1,260,000
22	Dispenser	Buah	3	11,925,000
23	Alat Rumah Tangga Lainnya	Buah	1	5,236,000
24	Headset	Buah	1	9,940,000
25	Camera Digital	Buah	2	28,800,000
26	LCD Monitor	Buah	1	2,805,000
27	Genset	Buah	1	6,350,000
28	ID Card Reader	unit	2	21,136,100
29	P.C Unit	Buah	2	34,813,800
30	Laptop	Buah	8	187,989,520
31	Tablet PC	Buah	5	62,678,880
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	9,192,000
33	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	18,324,000
34	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	550,000
35	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Buah	1	3,198,000
II	ASET TETAP DALAM RENOVASI			
36	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	paket	4	311,337,855
37	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	paket	1	138,752,486
III	ASET TETAP LAINNYA			
38	Lukisan Kanvas	Buah	1	8,500,000
	JUMLAH			2,455,659,666

PENAMBAHAN NILAI ASET

IV	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
	PERALATAN DAN MESIN			
39	Kapal Patroli Pantai	Unit		219,650,000
40	Kapal Patroli Cepat	Unit		791,027,000
41	P.C Unit	Unit		1,987,077
42	Laptop	Unit		1,949,000
	JUMLAH			1,014,613,077

3. Bagian Hukum Dan Kerjasama Teknik

Sasaran unit kegiatan pada bagian Hukum dan Kerjasama teknik tahun 2019 meliputi: a) Tersedianya rancangan aturan dan NSPK terkait Ditjen PHLHK b) tersedianya bantuan hukum Ditjen PHLHK dan c) Terselenggaranya kerjasama teknis dalam meningkatkan kegiatan efektifitas PHLHK, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 22 Capaian Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik

NO	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
I	Tersedianya rancangan aturan dan NSPK terkait Ditjen PHLHK	Jumlah rancangan kebijakan strategis	2	4	200%
		Jumlah NSPK	5	1	20%
II	Tersediannya bantuan hukum Ditjen PHLHK	Jumlah bantuan hukum Ditjen PHLHK	10	15	150%
III	Terselenggaranya kerjasama teknis dalam meningkatkan efektifitas kegiatan PHLHK	Jumlah kerjasama teknis dalam negeri terkelola	4	10	250%
		Jumlah kerjasama teknis luar negeri terkelola	5	15	300%

I. Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Hukum

Berikut ini uraian capaian kinerja untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2019.

a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka penguatan kewenangan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan maka dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang–Undangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan regulasi – regulasi terkait penegakan hukum bidang LHK dengan Kementerian/Lembaga lain dalam rangka mengupayakan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahapan pelaksanaan kegiatannya meliputi pengumpulan dan pengolahan bahan, menganalisa bahan, mengkoordinir kegiatan pembahasan perundang-undangan.

Pada kegiatan ini realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 208.332.940 dari pagu sebesar Rp. 208.665.000,- atau terealisasi sebesar 99,84%. Hasil yang dicapai terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penegakan Hukum Pidana Terpadu LHK;
2. Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Penyelenggaraan Intelijen Polisi Kehutanan;
3. Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Perlindungan Terhadap Peran Serta Masyarakat di Bidang LHK (Anti SLAPP);
4. Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Petunjuk Lelang Barang Bukti Sitaan Tindak Pidana Kehutanan;
5. Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang Manajemen Penanganan Kasus.



Gambar 7 Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

b) Rumusan Kajian Hukum

Dana untuk pelaksanaan kegiatan rumusan kajian hukum pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 332.940.000,- dengan realisasi terserap sebesar Rp. 332.416.964,- atau terealisasi sebesar 99,84%. Alokasi dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan, menganalisa bahan, mengkoordinir kegiatan kajian atau telaah bidang hukum LHK dalam bentuk dokumen/ laporan.

Hasil yang dicapai sebagai berikut:

1. Kajian hukum tentang Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan Ombudsman RI No: 0234/PW34-SRT/XII/2018 tentang Maladministrasi Penanganan Pencemaran Sungai Cileungsi,

2. Kajian hukum tentang analisa dan penyiapan langkah- langkah hukum atas potensi perlawanan terhadap pengamanan kayu asal Papua,
3. Kajian hukum tentang materi ajar dan rekrutmen sertifikasi hakim lingkungan,
4. Workshop Tematik Lingkungan Hidup,
5. Bimbingan Teknis Penulisan Sanksi Administrasi.



Kegiatan Koordinasi dengan Mahkamah Agung tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan



Kegiatan Bimbingan Teknis Penulisan Sanksi Administratif di Hotel Bogor Icon, 21 – 22 November 2019

Gambar 8 Kegiatan Rumusan Kajian Hukum

c) Pendampingan dalam rangka Penyelesaian Kasus LH dan Kehutanan

Dana untuk kegiatan Pendampingan dalam rangka Penyelesaian Kasus LH dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp. 685.615.000 dengan realisasi terserap sebesar Rp. 685.129.082 atau terealisasi sebesar 99,93%. Tingginya pencapaian realisasi ini diserap untuk 15 (lima belas) perkara gugatan pra peradilan dan perdata yang di tangani oleh Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik pada Tahun 2019 diantaranya dari Pengadilan Negeri (PN) Makassar, PN. Jakarta Pusat, PN.Sidoarjo, PN. Palembang, PN. Makale, Tana Toraja, PN. Nunukan dan PN. Ambon.

Rincian detail penanganan gugatan pra peradilan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perkara Nomor: 05/Pid.Pra/2019/PN.Mks
2. Perkara Nomor: 03/Pid.Pra/2019/PN.SDA
3. Perkara Nomor: 04/Pid.Pra/2019/PN.SDA
4. Perkara Nomor: 04/Pid.PRAP/2019/PN.JKT.PST
5. Perkara Nomor: 07/Pid.PRAP/2019/PN.JKT.PST

6. Perkara No: 09/Pid.PRAP/2019/PN.JKT.PST
7. Perkara No: 03/Pid.Pra/2019/PN.Plg
8. Perkara No: 2/Pid.Pra/2019/PN.Mak
9. Perkara No: 04/Pid.Pra/2019/PN.Mak
10. Perkara No: 5/Pid.Pra/2019/PN.Prp
11. Perkara No: 6/Pid.Pr/2019/PN.Prp
12. Perkara No: 147/Pdt.G/2019/PN.Mak
13. Perkara No: 3/Pid.Prap/2019/PN.NnkP
14. Perkara No: 17/Pid.Prap/2019/PN.Jkt.PstP
15. Perkara No: 6/Pid.Pra/2019/PN.Amb



Kegiatan Rapat Kerja Pembelaan
Hukum



Kegiatan Bimbingan Teknis
Pembelaan Hukum PHLHK

Gambar 9 Kegiatan Anggota Tim Pembelaan Hukum

b) Kemitraan dan Kerja Sama Teknik

a) Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri

Pada tahun 2019, anggaran untuk kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri sebesar Rp. 203.850.000,- dengan realisasi terserap sebesar Rp. 202.989.985,- atau terealisasi sebesar 99,58%. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik melalui Sub Bagian Kerja Sama Teknik telah menginisiasi penandatanganan 3 (tiga) Nota Kesepahaman antara Menteri LHK dengan Menteri terkait yaitu:

Tabel 23 Nota Kesepahaman Kerja Sama Dalam Negeri TA. 2019

No	Mitra	Judul	Ruang Lingkup	Waktu Penandatanganan
1.	PPATK	Kerja Sama Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Ruang lingkup: 1. Pertukaran informasi; 2. Asistensi penanganan tindak pidana pencucian uang; 3. Sosialisasi; 4. Pendidikan dan pelatihan; dan/atau 5. Penelitian atau riset.	1 Oktober 2019
2.	Menteri Dalam Negeri	Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ruang Lingkup: 1. Pemanfaatan data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; 2. Koordinasi terkait pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan	19 Februari 2019
3.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Ruang Lingkup: 1. Pelaksanaan reklamasi hutan dan penanaman rehabilitasi Daerah Aliran Sungai oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Pengendalian, penertiban, penataan perizinan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Sinkronisasi penggunaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung untuk kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 4. Pengawasan, penanganan permasalahan dan penegakan hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Pengendalian pertambangan skala kecil dalam rangka transformasi	23 April 2019

No	Mitra	Judul	Ruang Lingkup	Waktu Penandatanganan
			<p>penghapusan merkuri sesuai dengan Konvensi Minamata;</p> <p>6. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam kegiatan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;</p> <p>7. Pengendalian perubahan iklim dan implementasi <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC);</p> <p>8. Pelaksanaan inventarisasi bersama sumber daya alam di Kawasan Hutan;</p> <p>9. Pengembangan energi baru dan terbarukan di dalam dan luar Kawasan Hutan;</p> <p>10. Pemasangan peralatan pemantauan dan monitoring gunung api di Kawasan Konservasi;</p> <p>11. Pengelolaan museum kegunungapian dan <i>geopark</i> di Kawasan Konservasi;</p> <p>12. Pengelolaan sampah, limbah B3 dan B3 di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;</p> <p>13. Pertukaran data dan informasi bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;</p> <p>14. Peningkatan kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.</p>	



Gambar 10 Nota Kesepahaman KLHK dengan PPATK

Selain menginisiasi kegiatan penandatanganan naskah kerja sama (Nota Kesepahaman) sebagaimana disebut diatas, Sub Bagian Kerja Sama Teknik juga telah memfasilitasi kegiatan penyusunan dan pembahasan perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tindak lanjut kesepakatan yang telah dituangkan pada Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani. Fasilitasi kegiatan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi, pengumpulan bahan dan pertemuan teknis baik di lingkup Ditjen PHLHK maupun Kementerian/Lembaga yang terkait.

Kerja sama dengan PPATK lebih pada ruang lingkup pertukaran data informasi transaksi keuangan dalam upaya penegakan hukum. Sebagaimana mekanisme pertukaran informasi PPATK tidak hanya di lingkup Ditjen PHLHKLHK namun di seluruh Direktorat Jenderal lingkup KLHK. Terkait hal tersebut disepakati kerja sama dengan PPATK dibangun melalui Sekretaris Jenderal KLHK dengan Ditjen PHLHKLHK bertindak sebagai Narahubung.

Selama penyusunan rancangan perjanjian kerja sama tak banyak dijumpai hambatan berkenaan dengan substansi hanya saja penandatanganan Perjanjian Kerja Sama masih menunggu ketersediaan waktu dari pejabat penandatanganan.

Berikut tabel Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri yang dihasilkan selama Tahun 2019.

Tabel 24 Perjanjian Kerja Sama Ditjen Gakkum

No	Kerja Sama	Tentang
1	PKS Dirjen PHLHK dan Dirjen Dukcapil	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Penegakan Hukum LHK
2	PKS Dirjen PHLHK dan Sekretaris Umum BAKAMLA	Penegakan Hukum LHK di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
3	PKS Setditjen PHLHK dan Sekretaris Umum PHLI	Pengembangan Hukum Lingkungan Untuk Mendukung Penegakan Hukum LHK

**Gambar 11 Perjanjian Kerja Sama Ditjen PHLHK dengan Ditjen Dukcapil**

Untuk langkah kedepan, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik akan melakukan peninjauan kerja sama dalam negeri dengan beberapa mitra. Selain peninjauan dengan mitra yang baru, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik juga akan melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama maupun pembahasan rencana perpanjangan / Addendum NK dan PKS yang akan berakhir.

Berikut kerja sama dalam negeri yang sedang dalam proses (2 Amademen PKS, 1 Addendum/ Perpanjangan PKS dan 7 rancangan PKS).

Tabel 25 Rencana Kerja Sama

No	Mitra	Rencana Kerja Sama
1	Direktorat Perdata, Ditjen AHU	Amandemen PKS
2	Ditjen Dukcapil	Amandemen PKS
3	LAPAN	Addendum /Perpanjangan PKS
4	Komisi Yudisial	Pembahasan PKS
5	LPSK	Pembahasan PKS
6	Ditjen Minerba, Kementerian ESDM	Pembahasan PKS
7	OJK	Pembahasan PKS

No	Mitra	Rencana Kerja Sama
8	PPATK	Penandatanganan PKS melalui Sekretaris Jenderal KLHK
9	Ditjen Perhubungan Laut	Pembahasan PKS
10	Ditjen Bea Cukai	Pembahasan PKS

b) Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri

Sepanjang tahun 2019, Ditjen PHLHK terus meningkatkan partisipasi dan berperan aktif di berbagai *forum* kerja sama di tingkat regional maupun internasional. Upaya tersebut diwujudkan oleh Ditjen PHLHK yang terpilih menjadi *Chair*, Fasilitator atau Peserta dari berbagai forum pertemuan internasional yang berkaitan dengan penegakkan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya-upaya tersebut memiliki nilai strategis bagi Ditjen PHLHK dalam rangka pembelajaran untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan di bidang penyelesaian isu-isu global baik terkait *illegal logging*, perubahan iklim, perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) serta pembangunan berkelanjutan. Berikut beberapa forum pertemuan yang dihadiri oleh Delegasi dari Ditjen PHLHK

Tabel 26 Kegiatan yang dihadiri oleh Ditjen PHLHK

No	Tanggal Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Tempat
1.	20 – 23 Maret	Menghadiri <i>Special ASEAN Ministerial Meeting on Illegal Wildlife Trade</i>	Chiang Mai, Thailand
2.	1 – 5 April	Menghadiri <i>The 15th AWG on CITES and Wildlife Enforcement</i>	Malaysia
3.	19 – 26 Mei	Menghadiri <i>Letter of Invitation for the Pacific Environmental Security Forum (PESF)</i>	Wellington, New Zealand
4.	25-30 Juni	Menghadiri <i>Memory, History and Archives: 23rd SEAPAVAA Conference</i>	Noumea, New Caledonia
5.	29 Juni – 5 Juli	Menghadiri <i>The 29th Global Forum on Forest Governance</i>	London
6.	16 – 20 Juli	Menghadiri <i>The 20th ASEAN International Seminar on Current Issues Affecting Forestry and Forest Product dan 22nd ASOF Meeting</i>	Filipina
7.	27 – 31 Agustus	Menghadiri <i>the Effectiveness of Administration Sanction in Realizing the Sustainability of Environmental Law Enforcement</i>	Belanda
8.	29 Sept - 5 Oktober	Menghadiri <i>Pelatihan Singapore Cooperation Programme 2019</i>	Singapore

No	Tanggal Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Tempat
9.	12 – 25 Oktober	Melaksanakan kursus <i>Multilateral Environmental Agreement</i>	Siena, Italy
10.	12 – 15 November	Menghadiri penerimaan penghargaan <i>The Asia Environmental Enforcement Awards</i>	Thailand
11.	9-15 Desember	Menghadiri <i>COP 25 United Nation Convention on Climate Change Conference (UNFCCC)</i>	Spanyol

Pencapaian kinerja lain yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019 adalah dalam menerima penghargaan *The Asia Environmental Enforcement Awards*, dengan kategori Inovasi, Integritas dan Kepemimpinan *Gender* dalam penegakan lingkungan hidup dan kehutanan.



Dirjen GAKKUM menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam mengatasi kebakaran Hutan dan Lahan



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyampaikan pengalaman kolaborasi bersama militer dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dalam forum PESF



Perwakilan Ditjen PHLHK tengah mempresentasikan hasil penelitiannya kepada peserta EELF 2019





Perwakilan Ditjen PHLHK dalam AWG on CITES and Wildlife Enforcement



Gambar 12 Kegiatan Ditjen PHLHK pada Forum Internasional

Untuk mendukung kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri pagu yang disediakan sebesar Rp. 1.492.285.000,- dengan realisasi terserap sebesar Rp. 1.484.571.055,- atau terealisasi sebesar 99,48%.

Bentuk kerja sama Ditjen PHLHK juga dilakukan mitra kerja sama / hibah luar negeri. Berikut tabel Kerja Sama Luar Negeri yang dihasilkan selama Tahun 2019.

Tabel 27 Mitra Kerja Sama/Hibah Luar Negeri Ditjen PHLHK

Mitra Kerja Sama/ Hibah	Ruang Lingkup
UNODC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi, strategi dan dukungan penegakan kejahatan kehutanan 2. Penguatan jejaring kerjasama inter-agency 3. Penguatan kapasitas penegakan hukum kejahatan kehutanan 4. Penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat/ NGO dalam pemberantasan kejahatan kehutanan
UNDP Multidoor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pembentukan Sekretariat Multidoor 2. Fasilitasi penyelesaian kasus melalui pendekatan multidoor 3. Fasilitasi pelebagaan penyelesaian kasus melalui pendekatan multidoor

UNDP CIWT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kebijakan nasional dan regulasi 2. Penguatan kapasitas dan koordinasi 3. Peningkatan upaya penegakan hukum 4. Penerapan dan penyempurnaan pendekatan proyek pada skala nasional dan internasional
Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Jejaring Penegakan Hukum LHK; 2. Peningkatan Pengawasan Penataan Perizinan Perusahaan terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan; 3. Pengendalian Ancaman dan Gangguan Keamanan Kawasan Hutan; 4. Pembuatan Pedoman dalam Rangka Percepatan Eksekusi Putusan Perdata
USDOJ OPDAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM (PPNS) bidang penegakan hukum kejahatan LHK

c) Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Teknik

Kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama teknik dilakukan untuk mengkomunikasikan pelaksanaan kerja sama yang telah dibangun oleh Ditjen PHLHKdi Pusat dan di Daerah seperti di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan dan Wilayah Maluku Papua. Selain itu kegiatan Monev juga bertujuan untuk memastikan kegiatan kerja sama apakah berjalan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Selain itu untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan kerja sama teknik untuk tahun berikutnya sehingga proses pelaksanaan kerja sama teknik dapat berjalan optimal.

Pada tahun 2019 kegiatan monitoring dan evaluasi di fokuskan pada kegiatan pemantauan penyusunan perjanjian kerja sama antara Ditjen PHLHK dengan PPHLI, Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan Titian Lestari (Kalimantan Barat) dan Hibah BRG (Badan Restorasi Gambut) *Support Facility*. Adapun besaran anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 277.045.000,- dengan realisasi terserap sebesar Rp. 243.075.800,- atau terealisasi sebesar 87,74%. Rendahnya pencapaian angka presentase ini disebabkan belum tersedianya instrument evaluasi implementasi kerja sama.

4. Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana

Pada tahun 2019 terdapat 2 sasaran unit kegiatan untuk Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, yaitu:

1. Meningkatnya daya saing SDM Ditjen PHLHK;
2. Tersusunnya struktur organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif dan efisien.

Tabel berikut menunjukkan besaran target dan realisasi sasaran unit kegiatan Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada tahun 2019.

Tabel 28 Pengukuran unit kegiatan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana

No	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
I	Meningkatnya daya saing SDM Ditjen PHLHK	Tersedianya Polisi Hutan, PPNS, PPLH dalam mendukung PHLHK dan SDM PHLHK Kompeten	3375	2470	73%
		Jumlah PPLH memenuhi kebutuhan untuk pengawasan	338	146	43%
		Jumlah PPNS memenuhi kebutuhan untuk penyidikan dalam rangka penegakan hukum	354	210	59%
		Jumlah SDM PHLHK yang meningkat kompetensinya	328	1506	459%
II	Tersusunnya Struktur Organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif dan efisien	Jumlah UPT penegakan hukum yang efektif dan efisien	5	5	100%

Ditjen Penegakan Hukum LHK telah mengusulkan 1000 formasi CPNS untuk penerimaan tahun 2019. Berdasarkan keputusan Menteri PAN dan RB kuota formasi CPNS tahun 2019 bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diputuskan sebanyak 943 orang dan Ditjen Penegakan Hukum LHK memperoleh kuota sebanyak 147 formasi CPNS.

Tahap seleksi administrasi telah dilakukan pada tanggal 25-29 November 2019 di Hotel Bogor Icon yang diselenggarakan Biro Kepegawaian dan Organisasi dan diikuti perwakilan eselon I.

Adapun formasi CPNS 2019 Ditjen Penegakan Hukum LHK adalah sbb:

	ANALIS KEBIJAK AN	ANALIS KEPEGA WAIAN	PEREN CANA	ANA LIS KEU	ANALIS HUKUM	PENGE LOLA BMN	PENG ELOL A KEU	PLH	POLHUT PERTA MA	POLH UT TRAM PIL	POL HUT PEM ULA	JUM LAH
SETDITJEN	4	4	7	0	1	0	1	0	0	0	0	17
PPSA	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	7
PSLH	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	7
PPH	0	0	5	0	0	1	1	0	0	0	0	7
PHP	8	0	4	0	6	0	1	0	0	0	0	19
SUMATERA	0	0	0	0	1	1	1	3	3	3	9	21
JABANUSRA	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4	12
KALIMANTAN	0	0	0	1	1	0	0	2	3	3	11	21
SULAWESI	0	0	0	0	1	0	1	3	3	3	6	17
MALUKU PAPUA	0	0	0	1	1	1	1	3	3	3	6	19
JUMLAH	12	4	16	2	23	3	9	12	15	15	36	147

selanjutnya Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) akan dilaksanakan mulai Januari 2020.

Pegawai Ditjen PHLHK terdiri dari:

- 94 Polhut di Gakkum (514 SPORC)
- 146 PPLH, 75 diantaranya masih CPLH
- 210 PPNS KLHK sudah mempunyai SKEP/KTP dan aktif bisa menyidik.

Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas pegawai yang telah dilaksanakan sebanyak 15 kali :

- Pelatihan Infografis dilaksanakan pada tanggal 1-2 April 2019 di Hotel Santika Jakarta yang diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari setiap unit kerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pelatihan Menulis Siaran Pres dilaksanakan pada tanggal 18-19 September 2019 di Hotel Ara Tangerang dengan yang diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari setiap unit kerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Festival Gakkum diselenggarakan selama 3 hari mulai dari tanggal 23 – 25 Juli 2019. Festival ini juga dihadiri oleh 1000 peserta yang terdiri dari perwakilan Duta Besar Negara sahabat, Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE, Kepala UPT Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum, PPNS, PPLH, anggota Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC), Polisi Kehutanan dan anggota Pramuka.

- d. Pembinaan Pegawai pegawai Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan di Jimbaran Ancol Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum LHK berjumlah 72 orang.
- e. Diklat Dasar Arsip Dinamis dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK di Bogor pada tanggal 19-21 Februari 2019 yang diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari unit kerja Ditjen Penegakan Hukum LHK.
- f. Pelatihan Penataan Arsip Kepegawaian bekerja sama dengan unit Kearsipan Biro Umum Cimanggis dengan melibatkan tiga orang jabatan fungsional Arsiparis sebagai narasumber yang berlangsung pada 8-12 April 2019.
- g. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK di Serpong pada tanggal 21 Oktober – 11 November 2019 yang diikuti oleh 30 orang PLH yang berasal dari Ditjen Penegakan Hukum LHK dan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota.
- h. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Madya dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK di Pusdiklat Bogor pada tanggal 4-23 November 2019 yang diikuti oleh 30 orang PLH yang berasal dari Ditjen Penegakan Hukum LHK dan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota.
- i. Sosialisasi PP 49/2018 dan Pendataan PPNPN pada aplikasi SIMPEG dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2019 dengan dihadiri 30 orang peserta yang merupakan perwakilan unit kerja Ditjen Penegakan Hukum LHK yang berlangsung di Hotel Harris Jakarta.
- j. Sosialisasi SIMPEG bagi pegawai dan pengisian Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) bagi Operator dilakukan dalam rangka migrasi data KLHK dengan data kepegawaian yang berada di

Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2019 yang dihadiri oleh 150 orang dari Ditjen PHLHK dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK

k. Penyegaran Rohani

Narasumber yang hadir pada kegiatan ini adalah ustd. Ransi Al Indragiri dari Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019 di ruang pertemuan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihadiri oleh 100 orang pegawai.

l. Diklat Lainnya

1. Pelatihan public speaking (2 orang) di Jakarta tanggal 14-15 September 2019
2. Pelatihan Bahasa Inggris (1 orang) di Tangerang tanggal 20 Juni 2019
3. Diklat Analis Kebijakan (1 orang) di LAN Jakarta tanggal 10-20 September 2019
4. Pelatihan Drone bekerja sama dengan Biro Umum KLHK tanggal 21 Maret 2019

Perubahan organisasi di tahun 2015 yang menggabungkan dua kementerian yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan organisasi Ditjen Penegakan Hukum di Unit Pelaksana Teknis. Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016. Tentang Struktur Organisasi Balai Pengamanan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan.

Seanjutnya, untuk mengisi kekosongan eksistensi Ditjen PHLHK pada provinsi-provinsi yang tidak memiliki kantor seksi ataupun balai serta utamanya untuk memperkuat rentang penegakan hukum LHK seluruh Indonesia, pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Pos Gakkum berdasarkan Surat Keputusan Dirjen PHLHK Nomor SK.23/PHLHK/Set/Kum.1/8/2018 tentang Pembentukan Pos Penegakan Hukum LHK.

Analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang pegawai.

Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai, atau dapat pula dikemukakan bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu.

Tahun 2019 Ditjen Penegakan Hukum LHK telah merevisi ABK yang terdapat pada Kepmen LHK No. 415/2018 yang berdasarkan evaluasi diketahui bahwa ABK 2018 perlu direvisi karena kurang beragamnya jabatan fungsional yang dibutuhkan di Ditjen Penegakan Hukum LHK. Penyusunan ABK melibatkan semua unit kerja dan hasil penghitungan ABK telah diserahkan kepada Biro Kepegawaian untuk disatukan dengan ABK dari unit kerja lainnya. ABK KLHK 2019 telah diterbitkan melalui Kepmen LHK No. 946 Tahun 2019.

E. PENGUKURAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Pengukuran efektivitas capaian kinerja unit kegiatan Setditjen PHLHK Tahun 2019 termasuk dalam kategori rasio perbandingan > 1 , artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun 2018, Sedangkan efisiensinya termasuk kategori rasio perbandingan > 1 , artinya dalam pencapaian kinerja tahun 2019 berjalan secara efisien. Tabel berikut menunjukkan jumlah efektivitas dan efisensi pencapaian kinerja Setditjen PHLHK.

Tabel 29 Pengukuran efektivitas dan efisiensi sasaran strategis Setditjen PHLHK

No	Indikator	Capaian				Efek- tivitas (D/C)	Efisi ensi (D/F)
		Kegiatan		Anggaran			
		2018	2019	Real	Capaian		
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Dukungan Manajemen dan Teknis Kegiatan Lainnya Direktorat Jenderal PHLHK	98%	101%	50,153,608,367	99,16%	1.03	1,02

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Kinerja Tahun 2019

1. Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja yang ditunjukkan oleh Sekretaris Direktur Jenderal PHLHK pada tahun 2019 yang tercermin pada 21 Indikator unit kegiatan untuk 10 sasaran kegiatan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah.
2. Secara umum sasaran unit kegiatan yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2019 telah dipenuhi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK sesuai indikator kinerja unit kegiatan yang diperjanjikan.
3. Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 50,153,608,367,- atau 99,16% dari pagu sebesar Rp. 50,579,285,000,-
4. Pengukuran efektivitas capaian kinerja unit kegiatan Setditjen PHLHK Tahun 2019 termasuk dalam kategori rasio perbandingan > 1 , artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun 2018, sedangkan efisiensinya termasuk kategori rasio perbandingan > 1 , artinya dalam pencapaian kinerja tahun 2019 berjalan secara efisien.

B. Rencana Perbaikan Tahun 2020

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum menjalin kerjasama atau berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna meningkatkan SDM melalui pelatihan - pelatihan.
2. Memperkaya data dan informasi Gakkum LHK baik melalui akuisisi data antar kementerian/Lembaga/daerah, maupun pengambilan data primer di lapangan.
3. Mengembangkan sistem pengelolaan dokumen elektronik untuk menuju *paperless*.
4. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan kualitas laporan keuangan sehingga mencapai WTP.
5. Mencetak PPLH maupun PPNS baru untuk mencukupi kebutuhan penegakan hukum LHK sesuai target kinerja.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Kemal Amas, M.Sc
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Desember 2017

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

l. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Ir. Kemal Amas, M.Sc
NIP. 19590725 198603 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK	SAKIP Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019;	76 Poin

Program/Kegiatan

1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

Rp. 55,952,188,000,-

Desember 2017

Pihak Kedua,

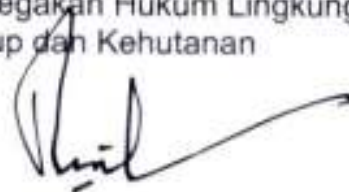
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan



Ir. Kemal Amas, M.Sc
NIP. 19590725 198603 1 003